

**PELAKSANAAN PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA (SATPOL PP) TERHADAP PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI
DI KECAMATAN TEMBILAHAN**

Oleh

Putri Wahyuli dan Raden Imam Al Hafis

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Administrasi Publik Fisipol UIR

ABSTRACT

In order to realize the vision of Indragiri Hilir regency, namely: "New Spirit Indragiri Hilir Towards a Prominent, Dignity and Bermarwah Regency" and to make the Indragiri Hilir Regency as Qori and Qoriah hull then Regent Indragiri Hilir issued Local Regulation No. 2 Year 2016 on Maghrib Community Movement . This effort was made to invite the Muslim community to re-fill the prosperous mushola, surau, langgar and mosque, especially for children, youth, youth, fathers and mothers in all walks of the Muslim community. The concept of theory that the author uses is Oversight. And the theory used is the theory of Manullang with a Variable of Supervision This research aims to determine the level of Implementation Supervision Satpol PP Unit Against Local Regulation Indragiri Hilir Regarding Maghrib People Movement Mengaji Indragiri Hilir regency, where the program Movement Maghrib Mengaji Society measured by 3 indicators are: Standard, Assessment, Improvement. The type of research located in the Office of Satuan Pamong Praja Police Unit of Indragiri Hilir Regency is a descriptive survey with qualitative research method, which is collecting data by way of direct meeting and interacting with people in the research area. The Key Informant namely Section Head of Supervision and Observation Satpol PP, religious leaders, and teachers of Ngaji, and Informants namely Community Leaders. Data analysis in this research is to search and arrange systematically data obtained from interviews, observation, and documentation, by organizing data into categories, describing into units, synthesizing, arranging into patterns, choosing which is important and which will be studied, and made conclusions. Based on this technical analysis the researchers assessed and concluded that the implementation of supervision of civil service police unit (Satpol PP) in Tembilahan sub-district should be optimized and more effective.

Keywords: Supervision, Standards, Assessment, Improvement, Policy.

ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Indragiri Hilir yaitu : “Spirit Baru Indragiri Hilir Menuju Kabupaten Yang Maju, Bermartabat dan Bermarwah” dan untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai lambungnya Qori dan Qoriah maka Bupati Indragiri Hilir mengeluarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji. Upaya ini dilakukan untuk mengajak masyarakat muslim untuk kembali mengisi memakmurkan mushola, surau, langgar dan masjid, khususnya untuk anak-anak, remaja, pemuda, bapak-bapak dan kaum ibu-ibu pada semua lapisan masyarakat muslim. Konsep teori yang penulis gunakan adalah Pengawasan. Dan teori yang digunakan adalah teori Manullang dengan satu Variabel yaitu Pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji Di Kabupaten Indragiri Hilir, dimana program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji diukur dengan 3 indikator yaitu : Standar, Penilaian, Perbaikan. Tipe penelitian yang berlokasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir ini adalah survey deskriptif dengan metode penelitian kualitatif, yaitu mengumpulkan data dengan cara bertatap langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian. Yang menjadi Key Informan yakni Kepala Seksi Pengawasan dan Pengamatan Satpol PP, tokoh agama, dan guru ngaji, dan Informan yakni Tokoh Masyarakat. Analisis data dalam penelitian ini mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Berdasarkan teknis analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) di kecamatan Tembilihan harus dioptimalkan dan lebih efektif lagi.

Kata Kunci : Pengawasan, Standar, Penilaian, Perbaikan, Kebijakan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seiring dengan melemahnya identitas bangsa Indonesia dan kuatnya arus globalisasi yang masuk, sedikit demi sedikit terus menggeser nilai-nilai dasar keagamaan dan norma-norma didalam kehidupan bermasyarakat. Disebabkan karena mengadopsi nilai asing yang masuk tanpa memfilter terlebih dahulu menyebabkan masyarakat terseret dalam tren masa kini, seperti food, fashion and fun. Hilangnya perhatian masyarakat terhadap petunjuk hidup yang telah diajarkan oleh agama menyebabkan Bangsa Indonesia semakin terpuruk dalam banyak hal.

Pada tanggal 30 Maret 2011 Bapak Menteri Agama Bapak Suryadharma Ali mencetuskan kembali kegiatan ini melalui program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji. Agar dapat terlaksananya program tersebut di Provinsi Riau sebagaimana yang dikeluarkan dengan peraturan Gubernur Riau Nomor 35 tahun 2012 tentang Masyarakat Magrib Mangaji Di Provinsi Riau yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2012.

Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji atau disingkat Gemar mengaji yaitu suatu gerakan untuk membudayakan kegiatan membaca Al-Qur'an setelah shalat Magrib di kalangan masyarakat baik dipertanian maupun pedesaan yang bertujuan untuk menghidupkan kembali budaya mengaji saat maghrib yang sebenarnya sudah

mengakar jauh di Indonesia. Bahkan kenangan masa kecil kita pasti mengantarkan suasana setelah Maghrib adalah waktu khusus yang penuh barokah untuk belajar dan mengaji. Namun sayang kegiatan ini semakin lama semakin hilang dan ditinggalkan oleh masyarakat terutama anak-anak dan para remaja seiring dengan perkembangan zaman modern saat ini.

Perencanaan maghrib mengaji memiliki peran strategis membentuk jiwa dan kepribadian masyarakat terutama pada kalangan anak-anak dan remaja sebab, budaya maghrib mengaji sudah lama tergeser dari kehidupan masyarakat disebabkan karena pengaruh globalisasi seperti acara TV yang menarik diwaktu maghrib, banyaknya tempat nongkrong yang membuat anak remaja lupa waktu, menyetel radio dan musik sehingga kitab suci Alqur'an hanya berupa buku yang disimpan dimeja dan lemari berdebu tanpa memahami makna yang terkandung didalamnya.

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Indragiri Hilir yaitu : "Spirit Baru Indragiri Hilir Menuju Kabupaten Yang Maju, Bermartabat dan Bermarwah" dan untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai lambungnya Qori dan Qoriah maka Bupati Indragiri Hilir pada tahun 2016 telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 2 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji.

Adapun beberapa kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir yang melaksanakan program gerakan masyarakat mengaji tersebut. Tembilahan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir yang menjalankan peraturan Bupati dengan maksud yang disebutkan pada Pasal 2 yaitu Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji adalah untuk mengisi waktu maghrib dengan mempelajari, membaca dan memahami Al-Quran bagi masyarakat di daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Upaya ini dilakukan untuk mengajak masyarakat muslim untuk kembali mengisi memakmurkan mushola, surau, langgar dan masjid. Langkah ini juga merupakan gerakan dakwah riil yang dapat memberikan makna dakwah lebih menyentuh pada umat, juga sebagai media dalam melakukan sosialisasi, internalisasi, eksternalisasi ajaran islam, khususnya untuk anak-anak, remaja, pemuda, bapak-bapak dan kaum ibu-ibu pada semua lapisan masyarakat muslim.

Pasal 3 Tujuan gerakan masyarakat maghrib mengaji bertujuan mempersiapkan generasi yang memahami tentang pokok-pokok ajaran agama yang dan memberantas buta aksara Al-Quran sehingga membentuk pribadi yang berakhlakul karimah dan memiliki karakter keagamaan yang kuat.

Pasal 4 sasaran gerakan masyarakat maghrib mengaji adalah seluruh masyarakat yang beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan dari usia anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua diwilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 2 Tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji ini sudah berjalan selama 3 tahun di Tembilahan.

Sebelumnya kebijakan tersebut adalah program Peraturan Bupati No 1 Tahun 2014 yang kini telah berubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 2 tahun 2016. Masyarakat Tembilahan cukup antusias dengan program Bupati tersebut dan berjalan cukup efektif dengan adanya spanduk di tiap persimpangan jalan dan melakukan razia oleh Satpol pp bagi masyarakat khususnya anak-anak dan remaja yang masih berkeliaran diwaktu maghrib.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, bagian kedua tugas pokok dan fungsi pada pasal 4 menjelaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 2 Tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji mendapatkan pengawasan dari Satpol PP yang berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir No. Kpts. 13 / SATPOL-PP / PPHD.P2 / I / 2017 Tentang Pembentukan Tim Pengawasan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji

Memutuskan kesatu yaitu membentuk tim pengawasan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, gerakan masyarakat maghrib mengaji. . Tujuan adanya pengawasan oleh Satpol PP ialah untuk dapat berjalan dengan apa yang diharapkan

dan dilaksanakan sesuai yang telah dibuat.

Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP berdasarkan standar operasional prosedur yaitu seperti :

1. Pemeliharaan, pengawasan, penertiban ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakkan peraturan daerah dan pertauran kepala daerah.
2. Melaksanakan pembinaan masyarakat.

3. Mengamankan tempat-tempat atau lokasi yang di anggap tempat keramaian / hiburan.

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dimana kebijakan tersebut hanya efektif selama 1 bulan pertama dibuat, dengan adanya bantuan petugas monitoring dari Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji tersebut.

Table 1 : Jadwal Pengawasan Tahun 2017 Bidang Penegakkan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir

| Bulan | Minggu I / Hari | | | | | | | Minggu II / Hari | | | | | | | Minggu III / Hari | | | | | | | Minggu IV / Hari | | | | | | |
|-----------|-----------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|
| | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M |
| Januari | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | | |
| Februari | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | |
| Maret | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | | | | ■ | | ■ | | | |
| April | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | |
| Mei | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | | | | ■ | | ■ | | | |
| Juni | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | |
| Juli | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | | | | ■ | | ■ | | | |
| Agustus | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | |
| September | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | | | | ■ | | ■ | | | |
| Oktober | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | |
| November | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | | | | ■ | | ■ | | | |
| Desemer | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | |

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir 2017

Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP mengenai peraturan daerah kabupaten indragiri hilir tentang gerakan masyarakat maghrib mengaji di kecamatan tembilahan adalah mengawasi setiap play station, billiard yang masih buka di waktu maghrib.

Berdasarkan dari laporan kegiatan yang peneliti miliki pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak sesuai dengan jadwal pengawasan yang dimana seharusnya seminggu 2 kali tetapi hanya di lakukan seminggu 1 kali

dan bahkan 2 minggu sekali. Proses pelaksanaan pengawasan Satpol PP terhadap Peraturan Daerah tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya pada Kecamatan Tembilahan sampai saat ini dinilai belum efektif. Kurangnya efektif dan ketegasannya Satpol PP kepada kalangan anak-anak dan remaja dalam hal ini membuat banyaknya anak-anak dan remaja masih bebas berkeliaran di jalan.

Tabel 2 : Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Indragiri Hilir 2017

| Kecamatan | Masjid | Surau | Gereja | Vihara |
|------------|--------|-------|--------|--------|
| Tembilahan | 47 | 56 | 1 | 1 |

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017

Berdasarkan jumlah masjid dan surau di atas di temukan pada laporan kegiatan yang peneliti miliki ada 7 mesjid dan 5 surau yang kedapatan tidak melakukan program gerakan masyarakat maghrib mengaji dan masih ada di temukan anak-anak dan remaja yang masih berkeliaran di waktu maghrib.

Beberapa hal yang menyebabkan program gerakan masyarakat mengaji tidak terlaksana dengan efektif berdasarkan hasil laporan kegiatan antara lain :

1. Kurang efektifnya pengawasan Satpol PP yang seharusnya seminggu 2x tetapi hanya dilaksanakan seminggu 1x dan bahkan 2 minggu sekali.
2. Masih banyak anak – anak remaja yang berkeliaran dijalan dan nongkrong ditaman swarnabumi, warnet, playstation, billiard pada waktu maghrib. Hal ini sesuai dengan laporan pengawasan gerakan masyarakat maghrib mengaji (gemmar mengaji) di wilayah Kecamatan Tembilahan dan sekitarnya Kabupaten Indragiri Hilir 2017.

Dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih tentang **“Pelaksanaan Pengawasan Satpol PP Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kecamatan Tembilahan”**
Rumusan Masalah

Berdasarkan dari fenomena yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta mengangkat permasalahan tentang:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan Satpol PP Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 2 Tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kecamatan Tembilahan?
2. Apa permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak dan remaja sehingga menyebabkan luntarnya budaya mengaji pada waktu maghrib?

Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Satpol PP terhadap Masyarakat Maghrib Mengaji di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak dan remaja sehingga menyebabkan luntarnya budaya mengaji pada waktu maghrib?

Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. **Kegunaan Teoritis**, yaitu peneliti ini diharapkan mampu untuk mengisi dan ikut berpartisipasi dalam

- perkembangan ilmu administrasi, khususnya dibidang Ilmu Administrasi Publik dengan konsentrasi kajian ilmu yaitu Kebijakan Publik.
- b. **Kegunaan Praktis**, Sebagai bahan masukkan bagi peneliti dan pembaca, umumnya tentang pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 2 Tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kecamatan Tembilihan.
 - c. **Kegunaan Akademis**, Sebagai bahan masukkan bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 2 Tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kecamatan Tembilihan.

STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Administrasi

a. Administrasi

Secara etimologis, sebagaimana yang dikemukakan oleh syafri (2012;3) administrasi berasal dari bahasa Latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”.

Istilah administrasi berhubungan erat dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang dalam menjalankan kegiatan dan rutinitas kehidupan sehari-hari. Kegiatan administrasi yang teratur dan sistematis akan melahirkan keadaan organisasi yang sehat dan dinamis.

Begitu sempitnya penafsiran tentang administrasi pada zaman dahulu. Namun seiring berjalannya

waktu, ilmu ini terus berkembang dan memiliki banyak penafsiran dikalangan para ahli.

b. Administrasi Publik

Terminologi *public administration*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syafri (2012;16) berasal dari Amerika Serikat dan Inggris yang pada awalnya dialihbahasakan menjadi ilmu administrasi publik. Jauh sebelumnya menggunakan istilah ilmu pemerintahan untuk menyebut subjek ini, namun perlu diketahui bahwa ilmu pemerintahan tidak betul-betul sama dengan ilmu administrasi publik.

Di samping istilah ilmu pemerintahan, berkembang pula istilah-istilah yang ekuivalen dengan ilmu pemerintahan seperti ilmu tata praja, ilmu administrasi tata praja, ilmu administrasi tata pemerintahan, dan yang terakhir berkembang adalah istilah *kybernologi*.

2. Konsep Manajemen Kebijakan Publik

Manajemen kebijakan *public* disarankan untuk dipahami sebagai proses karena sector dalam kebijakan *public* teramat luas untuk dibuatkan diferensiasi ataupun dipisahkan. Misalnya, pada pemilahan paling awam dapat digunakan pemilahan politik ala Montesquieu tentang *Trias Polica*, yaitu *legislative*, *eksekutif*, dan *yudikatif*. Ditingkat *eksekutif*, dapat dikelompokkan menjadi birokrasi dittingkat pusat, daerah, dan lokal.

Manajemen kebijakan publik sebagai proses terdiri atas tiga dimensi pokok, yaitu perumusan, implementasi, dan pengendalian. Bagian terakhir bersifat khusus dan sedikit berbeda karena lazimnya pada proses kebijakan yang ada hanyalah *monitoring kebijakan* dan *evaluasi kebijakan*.

Pencapaian kebijakan akan paripurna jika dikendalikan, termasuk bagaimana kebijakan dimonitor, dievaluasi, diberikan ganjaran dan hukuman, dan apabila diperlukan dilakukan revisi kebijakan. Khusus berkenaan dengan evaluasi kebijakan, pemahaman disini adalah bahwa evaluasi tidak hanya berkenaan dengan implementasi dan kinerja kebijakan, tetapi juga berkenaan dengan rumusan kebijakan dan lingkungan tempat kebijakan itu dilaksanakan.

3. Konsep Pengawasan

Variable terakhir yang harus didefinisikan dan dilaksanakan secara terstruktur dalam upaya mencapai efisiensi pengelolaan seluruh aktivitas organisasi, dan khususnya dalam hal mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan adalah pengawasan. Pengawasan dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi seorang manajer yang bertujuan untuk memperoleh suatu tingkat keterjaminan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Seperti didefinisikan oleh Terry (1990;166) bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan.

Berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengorganisasian (*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*) menurut Griffin (2004: 44). Keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan oleh seorang manajer secara berkesinambungan, sehingga dapat merealisasikan tujuan organisasi.

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien

Untuk dapat melaksanakan pengawasan maka harus dilalui beberapa tahap atau langkah dari pengawasan tersebut. Menurut Manullang (2008, 185) proses pengawasan tersebut terdiri dari :

1. Menetapkan Standart
 - a. Kuantitas
 - b. Kualitas
 - c. Waktu
2. Mengadakan penilaian (*evaluate*)
Kegiatan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti :
 - a. Dari laporan tertulis yang di susun bawahan baik laporan rutin maupun istimewa
 - b. Langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan atau bawahan di panggil untuk memberikan laporannya
3. Mengadakan tindakan perbaikan (*correction action*)
 - a. Mengetahui penyimpangan yang terjadi
 - b. Memperbaiki penyimpangan

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian praktis. Menurut Suriasumantri (dalam Sugiyono, 2012; 4) penelitian dasar atau murni ialah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui, sedangkan penelitian terapan adalah bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis.

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian survey deskriptif dengan metode penelitian kualitatif karena peneliti

mengumpulkan data dengan cara bertatap langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi (Sugiyono; 2012; 9)

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini di Kecamatan Tembilahan adalah dikarenakan ditemui beberapa permasalahan yang terjadi seperti banyaknya anak-anak dan remaja yang masih berkeliaran di jalan dan nongkrong sewaktu maghrib dan fenomena untuk maghrib mengaji di Kecamatan Tembilahan lebih banyaknya tingkat pelanggaran. Maka peneliti berinisiatif untuk mengangkat atau mengkaji yang tolak ukurnya berdasarkan permasalahan yang ada. Dan masyarakat Tembilahan tidak banyak yang menerapkannya, khususnya pada anak-anak dan remaja. Berbeda dengan Kecamatan yang lainnya, tingkat kesadaran akan maghrib mengaji sangat lebih tinggi.

Dengan alasan tersebut dan ditemukannya beberapa fenomena pada saat observasi maka penelitian memilih lokasi penelitian di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Key informant dan informant

1. Key Informant

Key informant yaitu informan kunci untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan dan sebagai subjek penelitian yang nantinya untuk dihubungi dan diwawancarai. Adapun sebagai subjek adalah Kasi Pengawasan dan Pengamatan Satpol PP, tokoh agama, dan guru ngaji,

2. Informant Penelitian

Informant adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti. Dan yang menjadi subjek informan penelitian ini adalah tokoh masyarakat.

a. Data primer

hasil penelitian lapangan, yaitu data dari hasil wawancara dan hasil data yang diperoleh langsung dari responden dilokasi peneliti yang meliputi permasalahan yang sedang diteliti.

1. Data tentang bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kecamatan Tembilahan
2. Informasi Pelaksanaan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kecamatan Tembilahan.

b. Sumber data skunder

Data skunder sebagai data yang memperkuat penelitian ini yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan, seperti laporan-laporan, literatur-literatur, dan lampiran data-data lain yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap yang dibutuhkan peneliti sebagai rujukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung ,melakukan dialog atau percakapan kepada responden berdasarkan tujuan penyelidikan untuk memperoleh data secara langsung dari responden terkait dengan penelitian ini.

2. Observasi

Yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui hasil pengamatan penelitian dalam melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun data yang berbentuk dokumen yang berisikan data penting, baik itu berbentuk teoritis ataupun data konkrit yang terdapat dilapangan dapat digunakan dan sangat diperlukan guna memperkuat hasil penelitian yang dilakukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Gerakan

Masyarakat Maghrib Mengaji Di Kecamatan Tembilahan

Berdasarkan tujuan penelitian penulis kemukakan pada bab sebelumnya, Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji atau disingkat Gemar mengaji yaitu suatu gerakan untuk membudayakan kegiatan membaca Al-Qur'an setelah shalat Magrib di kalangan masyarakat baik dipertanian maupun pedesaan yang bertujuan untuk menghidupkan kembali budaya mengaji saat maghrib yang sebenarnya sudah mengakar jauh di Indonesia. Bahkan kenangan masa kecil kita pasti mengantarkan suasana setelah Maghrib adalah waktu khusus yang penuh barokah untuk belajar dan mengaji. Namun sayang kegiatan ini semakin lama semakin hilang dan ditinggalkan oleh masyarakat terutama anak-anak dan para remaja seiring dengan perkembangan zaman modern saat ini.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 2 Tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji mendapatkan pengawasan dari Satpol PP yang berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir No. Kpts. 13 / SATPOL-PP / PPHD.P2 / I / 2017 Tentang Pembentukan Tim Pengawasan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji.

Dalam bab ini, diuraikan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji Di Kecamatan Tembilahan. Peneliti mendapatkan data dari hasil observasi, wawancara, dan

dokumentasi tentang program tersebut. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mewawancarai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, tokoh agama, guru ngaji, dan tokoh masyarakat.

Pada penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, data yang didapat berasal dari wawancara yang telah dipilih sesuai dengan kriteria peneliti yang dianggap bisa mewakili dari penelitian yang diangkat. Informan yang dipilih adalah orang yang mengetahui tentang pelaksanaan pengawasan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) terhadap peraturan daerah kabupaten Indragiri hilir tentang gerakan masyarakat maghrib mengaji di kecamatan tembilahan, dimana informan tersebut berjumlah 3 orang.

Hasil observasi dan wawancara merupakan data primer dalam penelitian ini, kemudian data skunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumentasi yang terdapat atau tersedia pada bagian satpol PP yang berupa data, laporan kegiatan, jadwal pengawasan, dan lainnya.

Wawancara merupakan proses Tanya jawab yang berlangsung secara lisan antara peneliti dan narasumber atau informan mengenai hal-hal yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara memfokuskan dan menanyakan pelaksanaan pengawasan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) terhadap peraturan daerah kabupaten Indragiri hilir tentang gerakan masyarakat maghrib mengaji di kecamatan tembilahan, dimana program ini adalah salah satu program unggulan pemerintah kabupaten Indragiri hilir.

Adapun subjek dari penelitian ini yang dijadikan narasumber atau informan adalah Alwis Sadra, B. Ac Kasi pengawasan & pengamatan

anggota tim dilapangan yang langsung memonitor program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji. Wawancara ini meliputi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan indicator yang dibuat peneliti tentang Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji Di Kecamatan Tembilahan, yaitu menggunakan teri menurut Manullang :

1. Menetapkan Standar
 - a. Kuantitas
 - b. Kualitas
 - c. Waktu
2. Melakukan Perbaikan
3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

1. Menetapkan Standar

a. Kuantitas

Standar pengawasan merupakan ukuran yang digunakan di dalam pengawasan untuk mengetahui dan membatasi ruang lingkup pengawasan, sehingga proses pengawasan terfokus pada obyek yang diinginkan diawasi. Menetapkan standard dalam proses pengawasan secara tepat memang agak sulit, akan tetapi menetapkan standar terkait jumlah dengan perilaku pegawai harus dilakukan.

Dengan adanya proses pengawasan oleh Satpol PP terhadap maghrib mengaji maka akan diketahui apakah dalam pelaksanaannya menghasilkan sesuatu yang diinginkan atau berbanding terbalik dengan apa yang diinginkan. Proses pengawasan juga menyangkut jumlah anggota yang turun untuk mengawasi. Sesesuai dengan apa yang disampaikan bapak Alwis selaku Kasi pengawasan & pengamatan dan melalui wawancara

penulis pada hari senin tanggal 26 Maret 2018

Pukul 10.15 WIB yaitu :

Berapa jumlah personil Satpol PP yang mengawasi program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji ?

“Pada tahun 2017 itu ada 31 orang dan Tahun 2018 ini ada sekitar 34 orang termasuk Kasak dan Penanggung Jawab bapak Satpol PP.”

Apakah 31 orang tersebut langsung turun semua untuk melakukan pengawasan ?

“Untuk itu memang semuanya langsung turun tetapi, dari 31 orang tersebut dibagi menjadi 2 regu. Tiap regu itu di bagi lagi menjadi 13 orang terdiri dan itupun dari Danru, Wadanru dan Intel. Terkadang dari 31 orang tersebut ada yang tidak hadir.”

Apakah Satpol PP sudah menurunkan petugasnya secara optimal untuk melaksanakan pengawasan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji kepada remaja dan anak-anak yang masih berkeliaran pada waktu maghrib ?

“Sejauh ini sudah optimal, dan hampir setiap malam turun ke taman swarnabumi, masjid, warnet dan tempat yang dapat mengganggu kegiatan maghrib mengaji. Apabila kedatangan anak-anak yang masih diluar pada waktu maghrib kami suruh pulang”

Melihat dari pernyataan bapak Alwis tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah personil pengawasan gerakan masyarakat maghrib mengaji itu berjumlah 31 orang. Dari 31 orang tersebut dibagi menjadi 2 regu. Regu pertama bernama regu praja dan regu kedua bernama regu wibawa. Tiap-tiap

regu berjumlah 13 orang terdiri dari perempuan dan laki-laki. Dalam jumlah pengawas program gerakan masyarakat maghrib mengaji ini memiliki peran yang sangat penting, karena hal ini yang dapat menentukan berhasil tidaknya pengawasan sebuah program. Dan hal ini yang menjadi target sasaran dari program tersebut.

Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP sudah optimal dengan mengawasi anak-anak yang masih berkeliaran di taman dan di warnet. Apabila kedatangan anak-anak yang masih berkeliaran di luar maka pihak Satpol PP langsung mengarahkan mereka pulang kerumah.

Berdasarkan hasil observasi yang saya temukan dilapangan, dari 1 regu yang berjumlah 13 orang tidak semuanya turun kelapangan mengawasi gerakan masyarakat maghrib mengaji dikarenakan ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan dan satunya lagi tanpa keterangan.

Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Huzaini selaku Ustadz, melalui wawancara penulis pada hari selasa tanggal 27 Maret 2018 yakni :

Menurut pandangan bapak bagaimana pelaksanaan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji ?

“Dengan adanya program gerakan masyarakat maghrib mengaji itu bagus dan memiliki banyak manfaat, selain meningkatkan pemahaman kepada anak-anak dan remaja gerakan masyarakat maghrib mengaji juga dapat menghidupkan kembali suasana mushola dan masjid.”

Sepengetahuan bapak apakah Satpol PP pernah melakukan pengawasan terkait program gerakan masyarakat maghrib mengaji ?

“Pihak Satpol PP memang benar, mereka pernah melakukan

pengawasan tentang masyarakat maghrib mengaji di Tembilahan”

Berapakah dalam seminggu Satpol PP mengawasi program gerakan masyarakat maghrib mengaji di Tembilahan ?

“Satpol PP mengawasi itu kira-kira seminggu itu bisa sekali bahkan kadang bisa 2 minggu sekali. Tapi untuk mengawasi di Mesjid Darul Hikmah ini mereka hanya datang kali untuk melakukan pengawasan nak”

Seperti yang di ungkapkan juga oleh bapak Satiwan selaku Guru Ngaji, melalui wawancara penulis pada hari senin tanggal 27 Maret 2018 yakni :

“Dengan adanya pelaksanaan gerakan masyarakat maghrib mengaji itu sangat baik sehingga dapat menghidupkan kembali nilai keagamaan pada anak-anak dan remaja untuk mengaji pada waktu maghrib.”

Satpol PP memang pernah melakukan pengawasan, untuk di surau Al-mukhlisin ini hanya 1 kali, itu pada tahun 2017. Untuk tahun ini satpol pp tidak ada lagi datang mengawasi.”

Selanjutnya jawaban dari pertanyaan yang sama yang di ungkapkan oleh bapak Sulaiman selaku RT yang banyak mengetahui tentang gerakan masyarakat maghrib mengaji , melalui wawancara penulis pada tanggal 27 Maret 2018 yakni :

“dengan adanya pelaksanaan gerakan masyarakat maghrib mengaji ini sangat baik untuk anak-anak dan remaja karena dapat mengurangi anak-anak dan remaja yang masih berkeliaran di waktu maghrib

sehingga bisa melaksanakan maghrib mengaji di masjid dan mushola.”

“untuk mengawasi itu Satpol PP pernah memang mengawasi.”

“Dalam seminggu yang saya ketahui itu kadang 1 kali bahkan kadang dalam seminggu itu tidak melakukan pengawasan. Kadang mereka juga melakukan pengawasan itu 2 minggu bisa 2 sampai 3 kali.”

Melihat pernyataan dari ustadz, guru ngaji dan tokoh masyarakat dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan gerakan masyarakat maghrib mengaji ini sangat baik sehingga dapat mengurangi remaja dan anak-anak yang dulunya pada waktu maghrib berkeliaran kini anak-anak dan remaja sudah tidak lagi berkeliaran. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dapat membantu program kegiatan gerakan masyarakat maghrib mengaji berjalan dengan lancar. Pengawasan oleh Satpol PP dalam seminggu itu bisa 1 kali mengawasi bahkan bisa 2 minggu itu 2 sampai 3 kali melakukan pengawasannya. Sehingga pelaksanaan pengawasan oleh Satpol pp terhadap gerakan masyarakat maghrib mengaji ini menjadi kurang efektif.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan, memang benar Satpol PP melakukan pengawasan tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji dan dengan adanya kegiatan gerakan masyarakat maghrib mengaji di Tembilahan banyaknya remaja dan anak-anak yang melakukan maghrib mengaji dan mengurangi jumlah remaja dan anak-anak yang berkeliaran di waktu maghrib. Sehingga dapat menghidupkan kembali nilai keagamaan pada remaja dan anak-anak.

b. Kualitas

Diantara standar yang harus ditetapkan dalam melakukan pengawasan ada standar menurut kualitas, yakni proses pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP apakah sudah efektif dengan yang ditetapkan atau malah berbanding terbalik dengan kenyataan dan mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Alwis Sadra B. Ac selaku kepala bidang penegakan dan hukum daerah melalui wawancara penulis pada hari senin, tanggal 26 Maret yakni :

Bagaimanakah proses pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP kepada remaja dan anak-anak yang berkeliaran pada waktu maghrib ?

“Proses pengawasannya itu dilakukan dengan cara kami pergi turun keliling seperti ke Taman, masjid, dan warnet pada waktu maghrib apakah masih ada anak-anak dan remaja itu yang berkeliaran diwaktu maghrib”

Adakah pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengawasi gerakan masyarakat maghrib mengaji ?

“Pada dasarnya Satpol PP melakukan pengawasan itu secara langsung, kalo untuk secara tidak langsung itu laporan kegiatan. Satpol PP memang melakukan pengawasan secara langsung untuk mengawasi remaja dan anak-anak pada waktu maghrib dan menghimbau kepada masyarakat untuk melaksanakan gerakan masyarakat maghrib mengaji.”

Apakah ada hasil yang diperoleh setelah melakukan pengawasan kepada remaja dan anak-anak baik langsung maupun tidak langsung ?

“Hasilnya ada, seperti warnet yang dulunya pada waktu maghrib masih buka sekarang sudah tidak buka lagi, walaupun masih ada remaja yang masih di warnet pada waktu maghrib untuk mencari tugas, kami menghimbau kepada pemilik warnetnya agar pintunya ditutup untuk mentaati program gerakan masyarakat maghrib mengaji. Untuk anak-anak yang masih berkeliaran di taman sudah berkurang, walaupun masih ada kami langsung suruh pulang. Masjid-masjid yang dulunya tidak melakukan program maghrib mengaji kini sudah melakukan program tersebut”

Melihat dari pernyataan bapak Alwis tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu dengan cara turun keliling ke taman, masjid, dan warnet. Pengawasan yang dilakukan ialah pengawasan secara langsung, mereka dapat mendatangi langsung warnet yang dulunya pada waktu maghrib masih buka sekarang sudah tidak buka lagi, tetapi jika mereka menemukan seorang remaja yang pada waktu maghrib masih diwarnet untuk mencari tugas, pihak Satpol PP menghimbau kepada pemilik warnetnya agar pintunya ditutup untuk mentaati program gerakan masyarakat maghrib mengaji.

Untuk anak-anak yang dulunya masih berkeliaran di taman waktu maghrib sekarang sudah berkurang, jika masih menemukan remaja dan anak-anak yang masih nongkrong di taman pihak Satpol PP langsung menegaskan kepada mereka untuk segera pulang. Masjid-masjid yang dulunya belum pernah

melakukan kegiatan program gerakan masyarakat maghrib mengaji kini sudah melakukan program tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan, pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dengan cara turun kelapangan mendatangi taman, warnet, masjid dan surau. Satpol PP melakukan pengawasan secara langsung. Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dapat mengurangi jumlah remaja dan anak-anak yang masih berkeliaran di waktu maghrib.

Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Huzaini selaku Ustadz, melalui wawancara penulis pada hari selasa tanggal 27 Maret 2018 yakni :

Menurut bapak sudah efektif atau belum pengawasan yang dilakukan oleh Satpol

PP untuk program gerakan masyarakat maghrib mengaji ?

“Menurut saya itu belum efektif nak, pengawasan maghrib mengaji ini juga butuh dukungan dari orangtua karena pengawasan dari orangtua juga sangat penting untuk program gerakan masyarakat maghrib mengaji. Jika orangtua mengarahkan anak-anaknya untuk pergi ke masjid / musholla yg dekat dengan rumahnya untuk melakukan maghrib mrngaji maka itu juga bisa membantu pengawasan Satpol PP akan menjadi sangat efektif.”

Bagaimana bentuk-bentuk pengawasan Satpol PP untuk masyarakat terkait dengan program gerakan masyarakat maghrib mengaji ?

“Bentuk-bentuk pengawasannya yang bapak ketahui itu nak mereka turun keliling mendatangi masjid atau surau lalu mereka memeriksa apakah di measjid ini ada kegiatan maghrib mengaji atau tidak.”

Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Satiwan selaku Guru Ngaji, melalui wawancara penulis pada tanggal 27 Maret 2018 yakni :

“Untuk saat ini pengawasannya itu belum efektif, karena masih adanya anak-anak dan remaja yang berkeliaran diwaktu maghrib ntah itu di warnet, di taman dan lain-lain.”

“pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP itu ya turun keliling mendatangi tiap-tiap masjid, surau warnet dan tempat yang dianggap mengganggu kegiatan program masyarakat maghrib mengaji.”

Selanjutnya yang di ungkapkan oleh bapak Sulaiman selaku masyarakat yang banyak mengetahui tentang gerakan masyarakat maghrib mengaji, melalui wawancara penulis pada tanggal 27 Maret 2018 yakni :

“saat ini ya belum efektif, karena memang masih adanya remaja dan anak-anak yang masih berkeliaran diluar pada waktu maghirb”

“mereka turun langsung ke masjid-masjid dan surau mengawasi apakah ada kegiatan maghrib mengaji atau tidak. Untuk kewarnet merekaeriksa apakah warnet tersebut masih buka atau tidak di waktu maghrib, apabila menemukan anak-anak yang masih di warnet mereka langsung menyuruhnya pulang.”

Melihat pernyataan dari ustadz, guru ngaji dan tokoh masyarakat dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP kurang efektif karena pengawasan maghrib mengaji juga butuh dukungan dari orangtua. Pengawasan dari orang tua juga sangat penting dan berpengaruh untuk program gerakan masyarakat maghrib mengaji sehingga tidak menyebabkan anak-

anak-anak tidak berkeliaran waktu maghrib.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap program gerakan masyarakat maghrib mengaji tersebut yaitu turun keliling ke Taman Swarna Bumi, Warnet, Mesjid dan tempat hiburan lainnya. Apabila diwaktu maghrib masih banyak anak-anak dan remaja yang masih berkeliaran di Taman atau di warnet maka mereka langsung di suruh pulang kerumah.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan, pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP belum efektif, dikarenakan masih banyaknya remaja dan anak-anak yang berkeliaran di waktu maghrib.

Waktu

Kemajuan teknologi kini banyak mempengaruhi otak kaum muda yang senang dengan acara TV dan gila gadget. Namun dilain sisi baca tulis Alqur'an saja tidak pandai. Keadaan ini terbalik dengan keadaan bangsa diawal-awal kemerdekaan dimana Indonesia diperjuangkan dengan kumandang takbir oleh para pemudanya.

Waktu yang diperlukan untuk melakukan pelaksanaan pengawasan gerakan masyarakat maghrib mengaji merupakan hal yang penting pula bagi terlaksananya pengawasan yang efektif. Untuk menjaga agar waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan dalam gerakan masyarakat maghrib maengaji ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan adanya standar waktu. Sesesuai dengan apa yang disampaikan bapak Alwis selaku Kabid penegak hukum dan melalui wawancara penulis pada hari senin tanggal 26 Maret 2018 yaitu :

Kapan dilakukannya proses pengawasan program gerakan masyarakat maghrib mengaji oleh Satpol PP ?

"Pengawasan masyarakat maghrib mengaji itu dilakukan ada hari Senin dan Rabu untuk minggu pertama, tetapi untuk minggu kedua itu hari Selasa dan Kamis. Jadi setiap minggu itu harinya selang seling. Untuk turun kelapangannya itu dimulai dari setelah sholat maghrib hingga azan Isya."

Berapakah dalam seminggu Satpol PP melakukan pengawasan maghrib mengaji ?

"Pengawasan yang kami lakukan itu dalam seminggu ada 2x dan itu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan."

Apakah razia kepada remaja dan anak-anak diwaktu maghrib sudah rutin dilakukan sesuai dengan jadwal pengawasannya ?

"sejauh ini kami sepertinya sudah lumayan rutin untuk melakukan pengawasan kepada remaja dan anak-anak di waktu maghrib."

Masih banyakkah tempat-tempat seperti warnet yang masih buka diwaktu maghrib? Dan masih adakah masjid / musholla yang belum melaksanakan kegiatan masyarakat maghrib mengaji ?

"Pada umumnya untuk warnet itu sudah pada tutup, tapi ada warnet yang masih buka 1 atau 2, itu tergantung dengan pemilik warnetnya lagi nak. Kami sudah memberitahu kepada mereka untuk tutup pada waktu maghrib. Untuk masjid dan musholla pun begitu juga masih ada juga yang belum melaksanakan kegiatan masyarakat maghrib mengaji ya walaupun hanya 1 2 lah nak"

Apakah ada dokumen yang berkaitan dengan jadwal pengawasan ?

“Dokumen yang berkaitan dengan jadwal pengawasan tu ada, dari jadwal pengawasan yang telah dibuat kami akan membuat dokumen laporan kegiatan. Dari laporan kegiatan itulah kami dapat mengetahui berapa banyak warnet masjid / musholla yang melanggar atau tidak menjalan program masyarakat maghrib mengaji”

Melihat dari pernyataan bapak Alwis tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan program gerakan masyarakat maghrib mengaji oleh Satpol PP dilakukan 2x dalam seminggu sesuai dengan jadwal pengawasan yang telah ditetapkan. Setelah melakukan pengawasan warnet-warnet yang dulunya buka pada waktu maghrib sudah tutup, tetapi dari pihak pemilik warnet masih ada juga yang buka diwaktu maghrib. Untuk masjid dan mushollah pada waktu maghrib sudah melakukan kegiatan masyarakat maghrib mengaji, tetapi ada juga masjid dan mushollah yang tidak melakukan kegiatan masyarakat maghrib mengaji. Razia kepada remaja dan anak-anak lumayan rutin dilakukan oleh pihak Satpol PP. Setelah melakukan kegiatan pengawasan mereka membuat laporan kegiatan pengawasan gerakana masyarakat maghrib mengaji.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP masih ditemukan juga warnet yang buka pada waktu kegiatan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji sehingga remaja dan anak-anak masih diluar pada waktu maghrib.

2. Melakukan Penilaian

Melakukan tindakan penilaian untuk kerja ini dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap penyimpangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Hasil dari melakukan tindakan penilaian ini kemudian dibandingkan dengan menggunakan ukuran yang akurat, dimana harus disusun secara lengkap dan valid. Melakukan tindakan penialian ini juga dapat memeriksa hasil pekerjaan yang telah dikerjakan.

Dengan menilai apa yang telah Satpol PP kerjakan maka dapat dilakukan pengecekan terhadap penyimpangan berdasarkan standard yang telah ditetapkan. Penialian bisa dilakukan oleh atasan ke bawahan atau dari masyarakat keada pihak yang mengawasi gerakan masyarakat maghrib mengaji tersebut. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Alwis Sadra B. Ac selaku kepala bidang penegakan dan hukum daerah melalui wawancara penulis pada hari senin, tanggal 26 Maret yakni :

Setelah melakukan pengawasan apakah ada dilakukan penilaian tentang kegiatan pengawasan ini ? sehingga kegiatan pengawasan selanjutnya menjadi lebih baik ?

“Kalau untuk penilaian itu dari masyarakat bukan dari kami. Tapi kami akan selalu melakukan pengawasan dengan sangat baik agar tidak ada lagi remaja maupun anak-anak yang berkeliaran di warnet atau dijalan atau dimanapun.”

Apakah ada penilaian yang dilakukan oleh atasan Satpol PP kepada bawahan yang melakukan pengawasan apabila ditemukan ketidak sesuaian terhadap bagian dalam pengawasan ?

“Kalo itu ada nak, anggota kan berjumlah 31 orang terusdi bagi 2 regu pengawasan agar pengawasannya dilakukan bergantian. Setiap regu itu turun melakukan pengawasan saya selalu ikut mendampingi mereka. disitu saya langsung menilai mereka. Apakah pengawasannya sudah sesuai dengan yang saya harapkan atau belum.”

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan, dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dapat membantu warnet yang dulunya pada waktu maghrib buka, kini warnet sudah banyak yang tutup di waktu maghrib. Walaupun masih ada atau 2 warnet yang masih buka di waktu maghrib.

Dengan adanya pengawasan dari Satpol PP remaja dan anak-anak sudah tidak banyak lagi yang berkeliaran di waktu maghrib. Bantuan dari orang tua juga mendukung gerakan masyarakat maghrib mengaji dengan menyuruh anak-anaknya untuk ikut maghrib mengaji.

Dari penjabaran indikator diatas peneliti menarik proposisi minor pertama bahwa Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji Di Kecamatan Tembilahan untuk indikator Melakukan Penilaian akan terlaksana dengan baik jika dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan/ditetapkan.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan ini dilakukan apabila, proses dan hasil kerja terdapat penyimpangan dari standar yang ditentukan, akan tetapi apabila proses dan hasil kerja telah sesuai dengan standar maka yang harus

dilakukan adalah peningkatan. Tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan harus dibuatkan penanganannya.

Dalam melakukan perbaikan ada beberapa kemungkinan yang harus dipertimbangkan, yaitu :

- Tersedianya alokasi waktu yang memadai
- Rasionalisasi tambahan pegawai dan atau peralatan
- Waktu yang cukup bagi Kasi untuk melakukan perbaikan
- Dan adanya usaha extra dari semua komponen yang ada.

Apabila usaha tersebut gagal dilaksanakan, maka perlu dilakukan penjadwalan ulang karena mungkin terdapat perubahan pada semua bidang.

Proses dan hasil kerja dari Satpol PP yang mengawasi remaja dan anak-anak akan melakukan tindakan perbaikan apabila dalam melakukan pengawasannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika masih banyak ditemukan remaja dan anak-anak masih berkeliaran di waktu maghrib maka Satpol PP harus mengadakan tindakan perbaikan dalam mengawasi. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Alwis Sadra B. Ac selaku kepala bidang penegakan dan hukum daerah melalui wawancara penulis pada hari senin, tanggal 26 Maret yakni :

Apakah banyak perbaikan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP sendiri saat menjalankan kegiatan pengawasan gerakan masyarakat maghrib mengaji ?

“Untuk tindakan perbaikan sejauh ini pasti ada karena saat mereka turun mengawasi itu mereka diarahkan oleh saya dan sayapun ikut juga turun kelapangan mengawasi gerakan masyarakat maghrib mengaji. Saat saya ikut turun kelapangan ada beberapa

anggota yang tidak ikut turun melaksanakan pengawasan tanpa izin.”

Perbaikan seperti apa yang bapak lakukan ?

“Saya memberikan peringatan kepada anggota yang tidak ikut turun kelapangan mengawasi agar tidak melanggar kedisiplinan lagi dan tidak melalaikan tugas yang telah diberikan.”

Apakah masih ada tempat hiburan yang masih buka diwaktu maghrib ?

“Untuk tempat hiburan yang masih buka diwaktu maghrib terkadang ada, 1, 2 tapi tidak terlalu banyak.”

Apakah Satpol PP melaksanakan suatu tindakan agar pengusaha tempat hiburan

tidak melanggar peraturan yang sudah diberikan ?

“Pihak kami melakukan suatu tindakan apabila mereka masih buka di waktu maghrib. Untuk pertama kami berikan teguran untuk tindak lanjut yang kedua kami masih memberikan teguran dan yang terakhir apabila masih buka kami langsung membawa pemilik tempat hiburan ke kantor untuk di tinjak lanjut.”

wawancara penulis pada tanggal 28 Maret 2018 yakni :

Tindakan seperti apa yang Bapak lakukan untuk membantu jalannya kegiatan masyarakat maghrib mengaji dengan maksimal sehingga dapat membantu Satpol PP dalam menjalankan tugas mereka dalam pengawasan ?

“Untuk membantu jalannya kegiatan masyarakat maghrib mengaji dengan maksimal saya mengadakan musyawarah kepada para orang tua, saya memberitahukan kepada

mereka bahwa kabupaten Indragiri Hilir memiliki program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji. Saya meminta kepada mereka agar anak-anaknya disaat maghrib untuk pergi mengaji kesurau / kemasjid dan tidak pergi berkeliaran diwaktu maghrib. Saya juga memberitahu kepada mereka apabila anak-anaknya kedapatan berkeliaran diwaktu maghrib akan di tangkap oleh Satpol PP, sebab Satpol PP melakukan pengawasan maghrib mengaji.”

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Hasan, Bapak Hasan mengadakan musyawarah kepada para orang tua dan meminta agar anak-anaknya melakukan mengaji diwaktu maghrib. Bapak Hasan juga memberitahukan agar anak-anaknya diwaktu maghrib tidak melakukan kegiatan diluar rumah selain mengaji. Apabila diwaktu maghrib akan ditindak lanjuti oleh Satpol PP.

Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Anak-Anak dan Remaja Sehingga Menyebabkan Lunturnya Budaya Mengaji Pada Waktu Maghrib

Adapun yang menjadi Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Anak-Anak dan Remaja Sehingga Menyebabkan Lunturnya Budaya Mengaji Pada Waktu Maghrib :

1. Masih banyaknya surau dan masjid yang belum melaksanakan program gerakan masyarakat maghrib mengaji.
2. Masih ada tempat hiburan seperti warnet yang buka diwaktu maghrib.
3. Perlunya pengawasan dari orangtua.
4. Masih banyaknya remaja dan anak-anak yang berkeliaran di waktu maghrib di taman swarnabumi.

PENUTUP

Kesimpulan

Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir, maka pada bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kecamatan Tembilihan, dan penulis juga memberikan saran sebagai acuan dari hasil penelitian yang sekiranya dapat berguna dan bermanfaat bagi Pemerintah dan Satpol PP untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya.

1. Menetapkan Standar

a. Kuantitas

Diketahui jumlah personil pengawasan gerakan masyarakat maghrib mengaji itu berjumlah 31 orang. Dalam jumlah pengawas program gerakan masyarakat maghrib mengaji ini memiliki peran yang sangat penting, karena hal ini yang dapat menentukan berhasil tidaknya pengawasan sebuah program. Dan hal ini yang menjadi target sasaran dari program tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP sudah optimal dengan mengawasi anak-anak yang masih berkeliaran di taman, warnet, dll. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dapat membantu program kegiatan gerakan masyarakat maghrib mengaji berjalan dengan lancar. dengan adanya kegiatan gerakan masyarakat maghrib mengaji ini sangat baik sehingga dapat mengurangi remaja dan anak-anak yang dulunya pada waktu maghrib berkeliaran kini anak-anak dan remaja sudah tidak lagi berkeliaran.

b. Kualitas

Pengawasan yang dilakukan ialah pengawasan secara langsung, mereka dapat mendatangi langsung warnet yang dulunya pada waktu maghrib masih

buka sekarang sudah tidak buka lagi, tetapi jika mereka menemukan seorang remaja yang pada waktu maghrib masih diwarnet untuk mencari tugas, pihak Satpol PP menghimbau kepada pemilik warnetnya agar pintunya ditutup untuk mentaati program gerakan masyarakat maghrib mengaji. pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP kurang efektif karena pengawasan maghrib mengaji juga butuh dukungan dari orangtua. Pengawasan dari orang tua juga sangat penting dan berpengaruh untuk program gerakan masyarakat maghrib mengaji sehingga tidak menyebabkan anak-anaknya tidak berkeliaran waktu maghrib.

c. Waktu

Pengawasan masyarakat maghrib mengaji itu dilakukan di hari Senin dan Rabu untuk minggu pertama, tetapi untuk minggu kedua itu hari Selasa dan Kamis. Jadi setiap minggu itu harinya selang seling. Untuk turun kelapangannya itu dimulai dari setelah sholat maghrib hingga azan Isya. Proses pengawasan program gerakan masyarakat maghrib mengaji yang dilakukan oleh Satpol PP kurang efektif. Dimana yang seharusnya dilakukan 2x dalam seminggu sesuai dengan jadwal tetapi pihak Satpol PP hanya melakukan pengawasan 1 minggu 1x bahkan 2 minggu 2 sampai 3x.

2. Melakukan Penilaian

Bapak Alwis selaku kepala bidang penegakan dan hukum daerah melakukan penilaian langsung kepada tiap regu yang sedang melakukan pengawasan. Dengan adanya pengawasan dari Satpol PP remaja dan anak-anak sudah tidak banyak lagi yang berkeliaran di waktu maghrib.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Saat bapak Alwis ikut turun kelapangan ditemukan ada anggotanya yang tidak ikut serta dalam mengawasi program gerakan masyarakat maghrib mengaji. Bapak Alwis memberikan peringatan kepada anggotanya agar tidak melanggar kedisiplinan lagi dan tidak melalaikan tugas yang telah diberikan. Untuk tempat hiburan yang masih buka masih ada ditemukan 1, 2 diwaktu maghrib. Maka Satpol PP memberi teguran untuk yang pertama kali. Apabila yang kedua kalinya masih buka juga maka Satpol PP memberikan surat peringatan. Ketiga kalinya kami langsung membawa pemilik warnet ke kantor dan ditindak lanjuti.

Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat mengemukakan atau memberikan saran agar program ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan untuk kedepannya, saran tersebut antara lain :

1. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus lebih tegas kepada pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Apabila seminggu itu harus 2x maka lakukan lah pengawasan itu seminggu 2x sehingga program gerakan masyarakat aghrib mengaji berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.
2. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga harus sering melakukan pelatihan kepada Satpol PP yang bertugas dalam mengawasi program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji ini agar pengawasan yang dilakukan sesuai dengan apa yang diinginkan.

3. Anggota Satpol PP harus turun sesuai dengan regu yang telah ditetapkan dan tidak boleh ada anggota yang tidak ikut turun kelapangan saat mengawasi program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji.
4. Kerjasama dengan pihak berbagai media perlu dijaga dan ditingkatkan lagi, karena media sangat penting dan membantu proses penyampaian pesan atau informasi mengenai program tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Muhammad Husain. 2002, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*.Bogor: Pustaka Thariqul Iah
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Brantas.2000, *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta. Kencana Predana Media Group.
- Husnaini, 2001.*Manajemen*.Jakarta: Bumi Aksara
- Komaruddin. 1992. *Manajemen Pengawasan Kualitas Terpadu, Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press
- Kusdi, 2009.*Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Manullang, 2008, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia

- Marsy, Maringgian. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mathis, R. L, Jackson, J. H, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Salemba Empat
- Mulyadi, Dedi. 2015. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nugroho, Riant 2008. *Public Policy*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo
- Pasalong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Siagian, Sondang. P. 1981. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Erlangga
- Silalahi, Ulbert, 1992, *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: CV Sinar Baru
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Siswanto, Hb. 2005, *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tayibnapi, Farida Yusuf. 2000. *Evaluasi Program Dan Instrument Evaluasi*. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Terry, George R. dan W. Rue, Leslie. 1990. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara
- Toha, Miftah. 2011. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Zulkifli. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Uir
- _____. Awan, Azam Dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Fisipol UIR

_____. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen*. Pekanbaru: Uir

Dokumen :

- Undang Undang Dasar 1945
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Pedoman Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2012 tentang Masyarakat Maghrib Mengaji
- Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir